

KETIDAKSIAPAN SEBAGIAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI UNTUK BERKOMPETISI DI DUNIA KERJA

INDAH KENCANAWATI

Abstract : *University is the chain that leads students to the door of maturity and intellectual maturity, in which case the university management is an integral part of national education. The curriculum is planned academic activities to guide students in an effort to acquire a set of skills that can be used as start-up capital in the life and function in society. Mechanism management of universities are typically reflected in the position, duties and powers of the Senate in making decisions. Supporting elements consist of the chairman, senate, executive academic support element, facilities and infrastructure and the status of the college itself. Entering the era of development and globalization which puts pressure on human resource development, the college began to be challenged to produce a resource that has the expertise, skills, and professional development as well as necessary in accordance with the personal characteristics and aspirations of each student, so that graduates are expected to compete in the workplace in accordance with its domain expertise, and in accordance with the study or science respectively.*

Kata kunci : Lulusan, Perguruan Tinggi, Dunia Kerja

A.PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi merupakan mata rantai yang mengantarkan mahasiswa ke pintu kedewasaan dan kematangan intelektual, dalam hal ini manajemen perguruan tinggi merupakan bagian integral dalam pendidikan nasional. Dalam pengelolaan manajemen di perguruan tinggi merupakan suatu hal yang unik dan khas, dimana mahasiswa berkedudukan sebagai bahan baku yang hendak dibentuk atau diproses sekaligus sebagai konsumen yang berkepentingan. Mahasiswa juga merupakan modal utama (yang membiayai) proses yang pada gilirannya menjadi produsen pada lembaga yang sama, oleh karena itu dalam setiap fungsi dan proses manajemen perguruan tinggi mahasiswa berperan menurut mekanisme yang disepakati bersama. Pemikiran tentang manajemen perguruan tinggi bertolak pada kebijaksanaan pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Raymond C. Gibson (dalam Nidraha, 1998) bahwasanya ada dua pola kebijakan dasar pendidikan tinggi, yakni : *pola yang berorientasi pada kemajuan ilmu (The advancedment of*

learning), dan *Pola yang berorientasi pada kemajuan pendidikan (the advancement education)*.

Kurikulum merupakan salah satu komponen pokok dalam suatu sistem pendidikan, bahkan kurikulum inilah yang merupakan salah satu alat yang akan membawa kepada tercapainya tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Menurut Harahap dan Poerbakawatja (1998). Kurikulum adalah : a) Suatu kelompok mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk dapat lulus (mencapai sertifikat) dalam salah satu bidang tertentu. Misalnya suatu kurikulum untuk pendidikan matematika, biologi dan sebagainya. b). Suatu rencana umum mengenai isi pendidikan yang disajikan kepada pelajar untuk lulus atau mendapat sertifikat atau untuk dapat memasuki suatu bidang tertentu. c). suatu kelompok pelajaran dan pengalaman yang diperoleh si pelajar dibawah bimbingan sekolah.

Kurikulum adalah rencana kegiatan akademik untuk memandu mahasiswa dalam upaya memperoleh seperangkat kemampuan yang dapat dipakai sebagai modal awal dalam kehidupan dan fungsinya di masyarakat (Depdikbud, 1997). Kurikulum PT didasari SK Mendikbud Nomor : 056/IJ/1994, disusun atas mata kuliah umum (MKU) dan mata kuliah dasar keahlian (MKDK), mata kuliah keahlian (MKK) yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu : 1). Kurikulum Inti, kelompok bahan kajian dan mata pelajaran yang dicakup dalam suatu program studi yang berlaku secara nasional, 2). Kurikulum lokal, kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diterapkan masing-masing perguruan tinggi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada program pendidikan sarjana, muatan lokal kurikulum inti mencakup 60%-80%, diploma 80% dan spesialisn 40%-60% dari jumlah satuan kredit semester (SKS) seluruh program studi masing-masing program pendidikan dan selebihnya merupakan muatan local.

Dalam PP No 30 tahun 1990 diamanatkan bahwa peranan perguruan tinggi dalam merancang kurikulum cukup besar, hal ini erat kaitannya dengan interaksi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, industri dan kebijaksanaan pemerintah yang selalu mengakibatkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. (Dardjowidjojo, S. 1991).

Disamping itu Undang-undang Pendidikan nasional juga mengemukakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

B. PENGELOLA PENDIDIKAN TINGGI

Mekanisme pengelolaan pendidikan tinggi yang khas tercermin pada kedudukan, tugas dan wewenang senat dalam pengambilan keputusan, dalam PP Nomor 30 Tahun 1990, dijelaskan meskipun unsur pimpinan (pada tingkat perguruan tinggi, fakultas, jurusan/program studi) memiliki kewenangan dan tanggung jawab hierarkis, tetapi peran civitas akademika (dosen, mahasiswa dan karyawan) yang telah diwakili oleh senatnya masing-masing (senat, universitas, senat fakultas dan senat mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa) secara formatif memiliki kedudukan lebih kuat dan jelas dalam pengembangan keputusan.

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi, unsur-unsur pendukungnya terdiri dari :

1. Unsur pimpinan (rektor/ketua/direktur dan sejumlah pembantunya) bertanggung jawab mengenai pengelolaan dalam sumber daya manusia, dana, sarana dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pengelolaan yang menyangkut semua pihak di perguruan tinggi, dalam pelaksanaannya unsur pimpinan perguruan tinggi dengan pimpinan pelaksana akademik (dekan dan ketua lembaga) membentuk form rapat pimpinan.
2. Senat perguruan tinggi merupakan bahan normatif yang mewakili dan menjaga kebebasan akademik, otonomi keilmuan dan pengelolaan termasuk dalam pengambilan keputusan. Senat mahasiswa perguruan tinggi merupakan forum representatif dan normatif dari mahasiswa dalam penyelenggaraan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.
3. Unsur pelaksana akademik, yaitu fakultas (di Universitas/institut) sbagai satuan induk organisasi beserta satuan-satuan di bawahnya (jurusan, laboratorium/studio). Lembaga penelitian, pengabdian masyarakat, program Pascasarjana mempunyai tingkat kedudukan serta pimpinan fakultas (dekan) ketua program bertanggung jawab kepada rektor, dekan atau ketua jurusan.

4. Unsur pelaksana akademik merupakan perangkat yang menyelenggarakan keseluruhan pelayanan teknis dan administratif yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya (manusia, sarana dan dana) dan pengolahan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Fungsi dan tanggung jawabnya terbagi habis dalam sejumlah biro yang jumlahnya disesuaikan dengan volume pekerjaan masing-masing perguruan tinggi.
5. Unsur penunjang terdiri atas satuan-satuan organisasi yang secara khusus dibentuk untuk secara langsung menunjang suatu kegiatan tertentu dalam melaksanakan fungsi akademik. Unsur penunjang berbentuk unsur pelaksana teknis (UPT), antara lain perpustakaan, pusat komputer, kebun percobaan dan bengkel.
6. Status perguruan tinggi, yaitu pedoman dasar penyelenggara kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Status yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Pedoman dalam merumuskan acuan penyelenggaraan kegiatan di masing-masing perguruan tinggi oleh Depdikbud (1997) berpedoman pada :

- a. Tujuan pendidikan
- b. Kaidah, moral dan etika pengetahuan
- c. Kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Adapun pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional perguruan tinggi (*tridarma*), yaitu :

1. Pendidikan, merupakan upaya menghasilkan manusia terdidik memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan IPTEK dan seni.

2. Penelitian, merupakan kegiatan menghasilkan pengetahuan empiris, teori, konsep, metodologi, model dan informasi baru guna memperkaya IPTEK dan seni.
3. Pengabdian masyarakat, merupakan kegiatan yang memanfaatkan IPTEK dalam upaya memberikan sumbangan demi kenajuan masyarakat.
7. Sarana dan prasarana, yang meliputi pengelolaan peralatan untuk kuliah, laboratorium, kantor. Prasarana yang meliputi pembebasan dan pengadaan tanah pembangunan lingkungan gedung laboratorium, gedung kuliah gedung kantor, gedung penunjang (bengkel, studio, mushalla dan lain-lain). Bagi perguruan tinggi, biaya penyelenggaraannya diperoleh dari dana pemerintah baik melalui anggaran rutin maupun anggaran pembangunan yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Pembiayaan perguruan tinggi, terdapat tiga sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu bersumber dari pemerintah (APBN), bantuan luar negeri dan dari masyarakat. Ketiga sumber pembiayaan tersebut terbagi dalam tiga jenis anggaran, yaitu anggaran rutin, anggaran pembangunan dan perolehan dari masyarakat. Anggaran rutin, anggaran pembangunan dan perolehan dari masyarakat. Anggaran rutin dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat reguler, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.
9. Pengawasan dan akreditasi, pengawasan dan penilaian mutu serta efisiensi perguruan tinggi secara berkala dilaksanakan Depdikbud dengan tata cara yang dibakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN), yang meliputi penilaian kurikulum, jumlah dosen, pelaksanaan pendidikan kurikuler dan ekstrakurikuler, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi, akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan. (Dardjowidjojo, S. 1991)

Adanya kurikulum yang tepat maka diharapkan mahasiswa mampu menerima dan menerapkan ilmu yang dimilikinya selama proses perkuliahan terjadi, sehingga akan terasa makna yang didapat dalam proses tersebut.

Banyak terjadi kesalahan dalam ketidakjelasan kurikulum yang ada menyebabkan mahasiswa merasa bingung karena setiap semester akan dihadapi mata kuliah yang tumpang tindih sehingga menyebabkan kelebihan jumlah SKS dan mahasiswa akan merasa sangat dirugikan.

C. PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI MASYARAKAT DAN INSTITUSI

1. Pendidikan Tinggi Sebagai Masyarakat Ilmiah

Masyarakat ilmiah merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui fenomena yang ada dengan melakukan pengkajian secara ilmiah di berbagai bidang ilmu, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan.

Ciri-ciri masyarakat ilmiah antara lain kritis, objektif, analisis, kreatif, konstruktif, bebas dari prasangka, kemitraan khususnya di antara civitas akademika, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis, berorientasi ke masa depan.

Tradisi lembaga akademik ditentukan nilai, norma dan etika yang mengukur sikap dan perilaku warganya, antara lain :

1. Tidak pernah merasa sebagai orang atau kelompok yang paling besar
2. Membuka diri terhadap kritik yang datang dari sesama akademika atau pihak lain.
3. Selalu tercipta suasana dialogis antara dosen dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Program pengembangan tenaga dosen mulai mendapat perhatian di perguruan tinggi di Amerika Serikat mulai pertengahan tahun 60-an yang dikenal dengan istilah *faculty development*. Menurut Bergquist dan Phillips, program itu mulai timbul dengan ditemukannya anomali, yaitu bahwa pengajaran di perguruan tinggi telah berlangsung secara tidak efektif, bahkan adakalanya diberikan tanpa kewenangan. Beberapa laporan yang dikutip mereka menunjukkan bahwa sebagian besar keresahan

mahasiswa disebabkan oleh kurang baiknya pengajaran, dan bahwa kepentingan mahasiswa telah diabaikan dalam kurun waktu yang telah lalu (1977 : 4), dengan adanya program yang jelas dan lembaga yang tidak otoriter akan menjadikan mahasiswa lebih dapat berfikir secara kritis dan analisis, sehingga bias bersaing dalam dunia kerja yang harus mau tidak mau akan tetap dihadapi setelah proses pendidikan berakhir. Memasuki era pembangunan jangka panjang II yang memberi tekanan pada pengembangan sumber daya manusia, perguruan tinggi mulai tertantang untuk menghasilkan sumber daya yang memiliki keahlian, keterampilan, dan profesi yang sesuai dengan keperluan pembangunan disamping sesuai dengan karakteristik dan aspirasi tiap pribadi mahasiswa. (Miarso, 2007)

Tantangan ini hanya akan terjawab dengan meningkatkan kemampuan tenaga pengajar maupun lembaga penyelenggara pengajaran, disamping itu juga masih banyak cara untuk mengantisipasi sehingga ketidaksiapan mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi untuk bersaing di dunia kerja dapat diatasi. Keserasian antara bidang pendidikan dengan minat dan bakat yang dimiliki juga memegang peranan yang sangat penting. Sehingga ilmu yang telah diperoleh selama proses pendidikan berlangsung akan terasa lebih bermakna dan dapat dimanfaatkan untuk masa-masa yang akan datang.

2. Pendidikan Tinggi Sebagai Institusi Ilmiah

Institusi ilmiah merupakan cerminan perguruan tinggi dengan unsur-unsur kelembagaan dan berbagai kegiatan fungsionalnya untuk menghasilkan keluaran, unsur-unsur dalam perguruan tinggi terdiri dari :

- a. Dewan penyantun, yang terdiri dari tokoh masyarakat diadakannya untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan, keanggotaan dan kepengurusannya dipilih oleh dan dari anggota dewan penyantun.
- b. Pimpinan perguruan tinggi (dibantu Pembantu Rektor) sebagai penanggung jawab pengelolaan perguruan tinggi, di samping

melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi.

Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga akademik. Dosen adalah tenaga pendidik berdasarkan pendidikan dan keahlian yang diangkat penyelenggara perguruan tinggi dalam tugas utama mengajar pada perguruan tinggi bersangkutan. Berdasarkan statusnya, dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa.

- c. Senat adalah badan normatif dan merupakan lembaga perwakilan tertinggi di perguruan tinggi dan di lingkungan fakultas. Senat di perguruan tinggi terdiri atas senat universitas / institut, sekolah tinggi, akademik dan politeknik. Senat universitas / institut terdiri dari para dekan dan wakil dosen. Rektor sebagai ketua senat, dibantu sekretaris yang dipilih dari para anggota senat.

Tugas pokok senat-senat di perguruan tinggi diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademik.
3. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan belanja perguruan tinggi oleh pimpinan perguruan tinggi
5. Menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
6. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonom keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
7. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor/ketua/direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik.

8. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika
9. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan
- d. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga berdasarkan pendidikan dan keahlian yang diangkat penyelenggara PT dengan tugas utama sebagai peneliti, pengembang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- e. Unsur pelaksana administrasi merupakan perangkat yang menyelenggarakan keseluruhan pelayanan teknis dan administrasi yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program. Keseluruhan pelayanan teknis dan administratif tersebut terbagi dalam sejumlah biro. (Husain, 1995).

3. Perguruan Tinggi Sebagai Sistem Sarana dan Prasarana

Perguruan tinggi biasanya tampak dalam wujud sarana dan prasarana yang segera dapat dilihat oleh semua orang. Sudah barang tentu yang utama adalah sarana akademik, seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain. Sarana administrasi umum, seperti gedung rektor berikut biro-bironya, sarana penunjang seperti gedung serba guna, gedung puskom, gedung olah raga, mushalla dan sebagainya. Informasi tentang sarana dan prasarana ini dapat dilihat dalam katalog dan denah perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ketersediaan gedung kuliah yang cukup dengan jumlah mahasiswa harus memiliki kesesuaian, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Dalam masa yang penuh persaingan seperti saat ini tentu akan lebih menuntut ketersediaan sarana yang juga lebih maju, seperti adanya akses internet untuk menunjang proses belajar mahasiswa dalam mencari sumber-sumber belajar yang sulit didapat misalnya karena keterbatasan bacaan dan lain sebagainya.

Ruangan yang kondusif dalam arti kata ruang kelas yang harus sesuai dengan jumlah mahasiswa yang seyogyanya tidak boleh lebih dari

30 orang dalam satu kelas. Pencahayaan yang cukup sehingga proses pembelajaran lebih mengasikkan karena tidak terganggu dalam membaca dan menerima sumber-sumber yang ada.

Dengan semua fasilitas yang telah dipersiapkan, maka diharapkan mahasiswa memang benar-benar mampu untuk menerima dan memproses setiap kajian ilmu yang diajarkan oleh dosen seefektif mungkin, sehingga dalam prosesnya nanti akan menjadikan mahasiswa yang benar-benar kreatif dan siap bersaing dalam bentuk apapun di dalam dunia kerja nantinya, dengan tidak melepaskan atributnya sebagai lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

D. KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PEMBINAAN LINK AND MATCH

Pengertian Link and Match dalam dunia pendidikan adalah keterkaitan antara produktivitasnya pendidikan, baik mencakup kuantitas, kualitas dan kualifikasi yang dihasilkan dengan kebutuhan pembangunan, dunia industri, maupun individu para lulusan. Dalam pasal 4 PP Nomor 60 tahun 1999 dikemukakan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan profesional, maka kebijaksanaan link and match dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti dunia industri dan dunia pemerintah daerah, depnaker dan lain-lain melalui kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan praktek lapangan, kuliah kerja nyata dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kreatifitas dalam dunia pendidikan. Link and Match harus selalu sejalan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak membuat prosesnya timpang karena ketidakjelasan dari programnya masing-masing. Keterkaitan antara produktifitas pendidikan dalam hal ini lulusan mahasiswa yang dihasilkan dengan kesiapan mereka untuk bersaing dalam dunia kerja harus terbukti dengan prestasi yang ditunjukkan dengan kualitas yang dinampakkan, sehingga akan terlihat nyata adanya hubungan yang signifikan diantara kedua unsur tersebut.

Pendidikan tinggi yang mencetak keahlian dibidang akademik juga ditunjang dengan keahlian lain, yaitu keahlian professional, dengan program pemerintah yang ada pada saat ini yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran guru dan dosen dalam program sertifikasi maka diharapkan akan terbentuk pula lulusan yang lebih professional, minimal dalam dunianya masing-masing, seperti jika ahli dalam bidang matematika maka harus mengembangkan potensi yang ada apakah dalam bidang aljabar, matrik dan sebagainya. Begitu juga jika ahli dalam bidang biologi, maka harus mengembangkan keahliannya tersebut secara profesional. Apakah dalam bidang kajian ilmu genetika, ekologi, taksonomi dan lain sebagainya. Sehingga akan terasa adanya link and match dalam dunia pendidikan. Istilah ketidaksiapan sebagian lulusan perguruan tinggi untuk bersaing dalam dunia kerja dapat kita antisipasi dengan bekal ilmu yang cukup dan kepercayaan diri yang memang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa yang telah mengenyam proses pendidikan, tidak hanya dalam waktu sesaat saja tetapi juga harus siap dan mampu untuk bersaing dalam masa-masa yang akan datang sesuai dengan kemajuan zaman dan persaingan global yang akan terus kita hadapi dalam kemajuan bangsa untuk bersaing dengan Negara-negara yang sudah maju, baik dalam bidang pendidikannya, industry maupun dalam bidang-bidang social dan budayanya. (Tilaar. 1998)

Secara umum, sistem pendidikan nasional merupakan sub sistem dari pembangunan nasional, ia berperan penting dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai kekuatan sentral dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan sistem tersebut, kegiatan pendidikan mengacu pada upaya pembentukan individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidup lahir dan bathin, dan meningkatkan peranannya sebagai pribadi, pegawai atau karyawan dan warga negara serta makhluk Tuhan. Sistem pendidikan mengacu pada proses pengupayaan pencapaian tujuan secara

utuh melalui transformasi potensi individu yang secara keseluruhannya didasarkan kepada kebutuhan kita masing-masing.

E. PENUTUP

Usaha yang harus dilakukan dalam mengantisipasi sehingga ketidaksiapan sebagian lulusan perguruan tinggi (mahasiswa) untuk dapat bersaing dalam dunia kerja yang harus mereka hadapi dapat diminimalisir dengan cara yaitu : proses pengajaran dilakukan secara efektif sehingga meliputi bagaimana membantu mahasiswa untuk mencapai tujuan belajar, dosen memiliki persiapan untuk melaksanakan peranan instruksional serta berperan juga dalam manajerial dalam pelaksanaan tugasnya, kegiatan belajar mengajar harus dipengaruhi oleh kontak sosial artinya corak belajar dan mengajar dipengaruhi oleh iklim kelembagaan, hubungan antara para dosen, mahasiswa dan administrator, serta kebijakan praktik dalam lembaga yang bersangkutan terbina dengan baik. Proses pendidikan harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan disesuaikan oleh perguruan tinggi masing-masing.

Alur sistem pengendalian pendidikan tinggi perlu upaya pembenahan mendasar dengan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan kejuruan dalam berbagai bentuknya, proses evolusi dan seleksi yang lebih rasional, relevansi program yang lebih sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dalam sektor pembangunan, disamping itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga akan nampak adanya kesepadanan dengan karakteristiknya masing-masing yaitu aspek atau kualitas seperti bakat, motivasi dan kemampuan pribadi yang dimilikinya harus benar-benar dapat dikembangkan sehingga mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Lulusan juga dituntut memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan tuntutan zaman, misalnya belajar lebih banyak, lebih cepat dan terus menerus sepanjang hayat, tidak malu untuk bertanya dan selalu mengembangkan kreativitas demi memacu keahlian dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh, pengarahan pada pekerjaan yang dimulai sejak dini yaitu dari pendidikan dasar. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan program

pelatihan pemuda yang sesuai dengan sumber daya alam yang dapat dijangkau baik secara fisik maupun finansial dengan cara bekerjasama dengan lembaga yang terkait yaitu antara perguruan tinggi dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Penulis ; Indah Kencanawati, M.Pd adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Bergquist, William H., and Steven R. Phillips, (1977), *Handbook for Faculty Development*, Vol. 2, Washington, DC,: The Council for the Advancement of Small Colleges.
- Dardjowidjojo, S, (1991). *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Husain, Abdul Rajak. (1995). *Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Aneka.
- Miarso, Yusufhadi, (2007). “ Pengembangan Tenaga Dosen dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Penelolaan Perguruan Tinggi”. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*,: jakarta.
- Tilaar. H.A.R. (1998). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Tera Indonesia.
- Undang-Undang . (1994). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zahara, Djafar Tengku. (2001). *Pendidikan non formal dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta : Balitbang Depdiknas